

---

# **MOMENTUM SISTEM PERADILAN ETIKA BERBANGSA DAN BERNEGARA**

**J. Haryatmoko**



---

*Etika :  
Menjaga Reputasi  
&  
Kepercayaan Publik*

# ETIKA: SENI HIDUP BIJAKSANA

- **1. Refleksi filosofis** untuk mengkaji baik/jahat, benar/salah tindakan manusia
- **Wacana normatif/mengatur**, tidak selalu imperatif kategoris,  
■ tetapi bisa imperatif hipotetis.
- **2. Pertimbangan baik/jahat** didasarkan pada **maksud/niat, cara/sarana,**  
■ **tujuan, konteks, hasil/akibat, pilihan kata** atau **kesadaran subyektif**
- **3. Tidak hanya apa yang terumus**, tapi pencarian makna hidup & pertimbangan  
■ **rasa keadilan, hormat akan martabat manusia dan kejujuran**

# Etika Bukan Sekedar Etiket



Apa tanggungjawab moral saya terhadap pihak lain ketika membuat suatu kebijakan dan keputusan ?



Apa batas-batas tanggungjawab saya dalam keputusan dan tindakan?  
(pribadi, organisasi, profesional, sosial, global, antar-generasi)



Siapa diuntungkan/dirugikan dalam kegiatan saya?



Nilai-nilai apa yang saya perjuangkan dalam aktivitas saya?

# PERBEDAAN ANTARA ETIKA DAN HUKUM

	<b>ETIKA</b>	<b>HUKUM</b>
<b>1. Tujuan</b>	1. Mencegah pelanggaran norma etis, pembinaan nurani, dan internalisasi nilai-nilai (mempertajam makna tanggungjawab)	1. Aturan untuk menjaga stabilitas tatanan sosial: menegakkan dan menghukum (mengorganisir tanggungjawab)
<b>2. Tekanan/Fungsi</b>	2. Menekankan 'mengapa' dan 'bagaimana' seharusnya bertindak: nilai dan prinsip → membentuk Jiwa Korsa (l'Esprit de Corps)	2. Bukan hanya berfungsi sebagai stare decisis (prinsip yang mengikuti keputusan kasus sebelumnya), tapi juga tekanan pada regulasi (penindakan sangat penting)
<b>3. Nilai Dibidik</b>	3. Memajukan core values	3. Demi tatanan sosial: aman tertib, damai dan sejahtera
<b>4. Sanksi</b>	4. Mendidik, mencegah pelanggaran norma, menjaga reputasi lembaga & kepercayaan publik	4. Pencegahan kriminalitas, deterrensi, memulihkan rasa keadilan dan keseimbangan masyarakat, rehabilitasi, atau keadilan restoratif
<b>5. Perubahan</b>	5. Tidak bisa diubah begitu saja seturut keinginan pembuatnya, tapi harus peduli kepekaan HAM, kebiasaan, nilai dan rasa keadilan	5. Mudah diubah seturut keinginan pembuat hukum: beban dan keuntungan masyarakat, (kepentingan penguasa?)

# KUALITAS AKTOR MENENTUKAN KEPEKAAN ETIKA

- **1. Kesadaran Moral:** Kesadaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat
- **2. Refleksi Diri:** Kemampuan untuk merenungkan tindakan dan nilai-nilai agar sesuai dengan nilai-nilai etika.
- **3. Empati dan Kebajikan Moral:** Kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga memahami konsekuensi dari tindakannya terhadap orang lain. Kebajikan moral: kejujuran dan keadilan
- **4. Pendidikan dan Pengetahuan:** Pengetahuan akan nilai-nilai moral dan aspek-aspek budaya dan tradisi membantu pemahaman etika.
- **5. Kritis terhadap Budaya dan Konteks:** Kesadaran dan kemampuan untuk mengkaji dan menilai nilai-nilai etika secara kritis.
- **6. Terbuka terhadap Diskusi dan Pembelajaran:** terbuka untuk terus belajar dan berdiskusi akan nilai-nilai.

# **L. KOHLBERG: PERKEMBANGAN KESADARAN MORAL**

## **■ I. Tingkat Pra-Adat**

- 1). Hukuman dan Ketaatan**
- 2). Keuntungan diri dan Pertukaran**

## **II. Tingkat Adat**

- 3). Harapan, Antarpribadi dan Keseragaman**
- 4). Kewajiban Masyarakat dan Sistem Sosial**

## **III. Tingkat Post-Adat**

- 5). Kontrak Sosial dan Manfaat Sosial**
- 6). Prinsip Etika Universal**

# AUDIT ETIKA

**Audit Etika:** mengevaluasi sejauh mana organisasi mematuhi kebijakan, peraturan, kode etik, & prinsip-prinsip etika, konsistensi dengan kode etik organisasi, pelaporan dan penanganan pelanggaran etika.

- 1. Audit Budaya Organisasi:** evaluasi budaya, nilai-nilai organisasi dan bagaimana memengaruhi perilaku anggota. **(i).**Kultur organisasi terkait dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab; **(ii).** Efektivitas komunikasi nilai dan norma. **(iii).** Keterlibatan dan dukungan manajemen thd budaya etika.
- 2. Audit Proses Etika:** evaluasi proses organisasi untuk mengelola dan mempromosikan praktik etika; **(i).**Proses keputusan etis. **(ii).**Sistem pelaporan pelanggaran etika. **(iii).** Program pelatihan etika .
- 3. Audit Konflik Kepentingan:** evaluasi kebijakan dan prosedur terkait dengan pengungkapan dan penanganan konflik kepentingan, serta praktik pencegahan konflik kepentingan di dalam organisasi.
- 4. Audit Kinerja Etika:** evaluasi dampak program etika yang diterapkan organisasi. **(i).**Efektivitas program pelatihan etika. **(ii).**Tingkat kepuasan dan persepsi karyawan terhadap budaya etika organisasi. **(iii).**Pengaruh praktik etika terhadap reputasi dan hubungan dengan pihak eksternal.



# SEGITIGA KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK

- Pengetahuan yang terspesialisasi
  - Pengetahuan tentang hukum
- Manajemen program dan strategi
  - Manajemen sumberdaya

Haryatmoko (2011: 21)  
mengacu ke  
J.S.Bowman (2010: 23)

## KOMPETENSI TEKNIS

### Kompetensi Etika

- Manajemen Nilai
- Penalaran Moral
- Moralitas Individual
- Moralitas Publik
- Etika Organisasi

### Kompetensi Leadership

- \* Penilaian & Penetapan tujuan
- Ketrampilan manaj. hard/soft
- Gaya Manajemen
- Ketrampilan politik & negosiasi
- Evaluasi

# PRINSIP EPIKEIA

1

- Bentuk penalaran moral yang memungkinkan adanya **pegecualian** yang bisa dibuat terhadap penerapan hukum yang ketat, **tetapi akibatnya justru membawa ke hasil yang tidak adil atau sulit diterima penalaran**

2

Menggunakan **kebijaksanaan praktis** (*phronesis*) dan **diskresi** untuk mengambil keputusan etika yang **melampaui apa yang dituntut hukum** agar bisa mencapai hasil yang lebih adil atau lebih bisa diterima penalaran akalbudi

3

Biasanya dikaitkan dengan konsep *equity* atau *fairness* untuk mendamaikan antara tuntutan keadilan dan kompleksitas situasi kehidupan nyata

# FAIRNESS

- Gagasan yang lebih luas dan subjektif **terkait dengan perlakuan yang adil dan tidak memihak**
- **Memperlakukan seseorang atau kelompok dengan cara yang adil dan tidak memihak:** memastikan bahwa keputusan, tindakan, atau hasil tidak bias atau sewenang-wenang dan bahwa orang-orang diberi kesempatan yang sama
- **Perlakuan yang sama untuk semua orang**, terlepas dari perbedaan setiap orang
- **Konsep lebih subjektif:** yang dianggap "adil" dapat berbeda dari satu orang ke orang lain dan dari satu konteks ke konteks lain: **didasarkan pada persepsi keadilan dan kebenaran.**
- **Fokus pada proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan atau mendistribusikan sumber daya.** Memastikan prosedur adil sebagai bagian pencapaian keadilan.

# EQUITY

- Lebih spesifik dan berfokus pada **pencapaian keadilan dengan mengatasi kesenjangan sumber daya dan peluang.**
- Mengacu pada **distribusi sumber daya, manfaat, dan beban dengan cara yang adil dan proporsional:** fokus pada **mengatasi kesenjangan dan mencapai keseimbangan yang dianggap adil** berdasarkan kebutuhan, keadaan, dan kontribusi individu
- **Setiap orang memiliki kebutuhan, latar belakang, dan titik awal yang berbeda.** Maka perlu menyediakan sumber daya dan peluang dengan cara yang memperhitungkan perbedaan.
- **Mengandalkan ukuran dan kriteria yang lebih nyata** untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya atau peluang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.
- **Menekankan pada hasil yang sebenarnya,** berusaha untuk **memperbaiki ketidakseimbangan dan kesenjangan dalam hasil ini** dengan mempertimbangkan perbedaan individu.

---

*Implementasi Etika  
Sangat Ditentukan oleh  
Kompetensi Etika*

# MEMBANGUN KOMPETENSI ETIKA

1

Intensitas kepedulian etika dan ada/tidaknya pelatihan etika.  
**Dengan pelatihan rutin** (syarat naik pangkat/ jabatan struktural) **dikembangkan keyakinan dan pembiasaan pada nilai-nilai etika.**

2

**Komisi etika bertugas dalam pembentukan kompetensi etika** karena budaya etika organisasi **mempertajam penalaran etis**

3

**Peran pimpinan untuk** mencipta perilaku etis dalam organisasi: teladan dan jeli memahami faktor-faktor keputusan dan tindakan agar sesuai dengan tuntunan keadilan

4

Keputusan etis tumbuh bila **sanksi/imbalan,** organisasi & evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etis

# KETRAMPILAN ETIKA PUBLIK

1

Tingkat kesadaran penalaran moral sebagai dasar pengambilan keputusan yang etis

2

Kemampuan memahami etika sebagai sarana dalam menghadapi konflik

3

Kemampuan menolak perilaku yang berlawanan dengan etika

4

Mampu menerapkan teori-teori etika dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi

# LIMA PILAR INTERNALISASI NILAI

1

**Pelatihan etika** secara rutin (rekrutmen, kenaikan jenjang)

2

**Penjabaran nilai-nilai inti pejabat** melalui kompetensi & kinerja dengan melibatkan semua *pemangku kepentingan*

3

**Membangun budaya etika** dalam organisasi, juga skematisasi dan sosialisasinya

4

Tuntutan standar sikap/perilaku hakim:  
**pakta integritas & kode etik**

(setiap tahun ditandatangani)

5

**Evaluasi kinerja** dari perspektif *core values* dan audit etika

# TIGA PRINSIP HABITUS ETIS

1

Karakter dibentuk oleh apa yang kita lakukan, bukan oleh apa yang kita katakan, ketahui/yakini

- Butuh pelatihan & pembiasaan dalam memperjuangkan suatu nilai

2

Setiap pilihan/keputusan menentukan dalam membentuk menjadi orang semacam apa kita

- Dibiasakan memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan peduli kesejahteraan umum

3

Tindakan etis mengandaikan keberanian bertindak tepat, meski penuh risiko & membayar mahal

- Membiasakan diri pada prinsip keadilan, kesamaan hak dan hormat martabat manusia



# HABITUS ETIS & KOMUNITAS PENDUKUNG

**Habitus:** kecenderungan/sikap hasil ketrampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak selalu muncul dalam kesadaran), tapi efektif mengatur perilaku sehari-hari.  
Contoh: jujur, kerja keras, cekatan, terbuka & toleran.

Internalisasi nilai memperhitungkan *habitus*: **terbentuk melalui pelatihan, pembiasaan, pengalaman & perjumpaan**

**Sosialisasi & internalisasi nilai** mengandaikan mekanisme pembatinan, persepsi, evaluasi dan **komunitas pendukung**.

# PELATIHAN MEMBENTUK HABITUS ETIS

**Pelatihan pemecahan kasus-kasus**  
yang sering dihadapi

Penjabaran karakter perlu peran pemangku kepentingan: **individu** (atasan, kolega, sistem karir, remunerasi, keluarga/lingkungan) dan **praktek lembaga**: *core values*, kode etik, peraturan, & sanksi sosial

Partisipasi dalam kegiatan di luar pekerjaan, pembelajaran melalui pengalaman & *community service*  
(Kerja *Pro bono*)

**Dirumuskan karakter KPK yang responsif & profesional** terhadap pelayanan publik *dengan* mempertimbangkan jenjang karir

---

*Implementasi  
Kode Etik  
&  
Komisi Etika*

# FUNGSI KODE ETIK

1

**Mencegah** tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai kepentingan pemangku kepentingan dan mengabaikan prosedur

2

Menjaga reputasi/integritas Komisioner untuk **menumbuhkan “jiwa korsa”**

3

**Mempertajam makna tanggungjawab** sehingga semakin peka terhadap masalah-masalah keadilan dan mampu mengeksekusi

4

**Mempertajam penalaran etika** sehingga peduli perlunya membangun institusi-institusi yang lebih adil

# IMPLEMENTASI KODE ETIK

1

Perlu **komisi yang mengatur,** memberlakukan dan mengawasi aturan & standar etika  
(MK DPR)

2

Diorganisir secara berkala pelatihan etika untuk meningkatkan kesadaran moral dan **belajar memecahkan masalah-masalah dilema moral** yang dihadapi DPR

3

**Komisi etika** memberi **pengarahan, pendampingan & evaluasi** dari segi etika terhadap cara menghadapi masalah-masalah kebijakan sebagai politisi

4

**Komisi Etika** memberi sanksi dengan informasi pelanggaran, bahkan bila tiada laporan bila dianggap mengganggu kinerja

# SEGITIGA MODALITAS AGAR KODE ETIK LEBIH EFEKTIF

## Aspek Perilaku

- Penyusunan: perlu masukan dari bawah
- Inventarisasi pelanggaran (kasus MK)
- Komisi Etika, Pendidikan/Pelatihan Etika di setiap kenaikan jenjang & jabatan struktural

## Teknologi

- E-Governance, E-Procurement,  
E-Money,
- UX Design & User Interface

## Aspek Organisasional

- Mekanisme *Whistle-Blowing*, hotlines,  
Ombudsman, Kerja *Pro Bono*, KPW
- Rotasi jabatan, karir atas dasar prestasi
- Audit Etika
- Pakta Integritas & “Salute to Service”

---

*Lima Pola Hubungan  
Etika dan Hukum  
dalam Dinamika Politik*

# LIMA POLA HUBUNGAN ETIKA DAN HUKUM

Jean Ladriere

- 1. Etika menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik
- 2. Perjalanan sejarah kongkrit memberi bentuk etika dan eksistensi kolektif
- 3. Voluntarisme Etika
- 4. Etika berada di luar politik dan hukum, tetapi selalu mengingatkannya
- 5. Politik dan hukum dikaitkan dengan campurtangan kekuatan dalam sejarah.



# 1. ETIKA: MENGAITKAN HUKUM DAN IDEAL SOSIAL-POLITIK

- Upaya nyata dilakukan untuk mencapai ideal itu, tapi sesempurna apa pun usaha itu tidak akan pernah bisa menyamai ideal tersebut.
- **Penganut hukum kodrat:** pola hubungan hukum kodrat (jiwa) dan hukum positif
- Kehidupan politik hanya merupakan cermin kehidupan sempurna seperti yang ditunjuk oleh etika politik
- **Thomas Aquinas:** “Hukum positif pada hakikatnya mengatur sejauh ambil bagian dalam akal budi yang benar atau lurus (hukum kodrat), bila menyimpang disebut hukum yang tdk adil, maka hakikatnya bukan lagi membuat tatanan, tapi menjadi dasar kekerasan (S.T. Q.93, Art.3)

## 2. SEJARAH, ETIKA DAN EKSISTENSI KOLEKTIF

- Melalui kodifikasi hukum positif yang diberlakukan bisa memberi bentuk moral dan eksistensi kolektif
- Pewujudan moral berlangsung dalam pertarungan kekuatan dan kekuasaan, konflik kepentingan.
- Penggerak pewujudan etika → perjuangan melalui partai politik, birokrasi, hukum, institusi, pembagian sumber-sumber ekonomi.
- 
- Hukum positif: institusi kehendak baik yang mengorganisir tanggung jawab.
- Model Marxis: siapa diuntungkan, siapa dirugikan oleh hukum atau institusi

@Perpus-kucing

### 3. VOLUNTARISME ETIKA

- Di satu sisi, hanya dalam kehidupan nyata moral bisa memiliki makna
- Di sisi lain, moral dimengerti sebagai sesuatu yang transenden yang tidak dapat direduksi ke dalam hukum dan politik.
- Cara untuk menjamin kesinambungan moral dan hukum: menerapkan pemahaman kehendak sebagai kehendak murni, seakan kehendak identik dengan tindakan.

#### Implikasinya ada dua pilihan:

- 1) **Pilihan reformasi terus-menerus**: moral diterapkan dalam kehidupan kongkrit, tapi sangsi akan keberhasilannya
- 2) **Revolusi puritan** (Taliban Afganistan). Ada kehendak moral yang yakin bahwa penerapan tuntutan moral bisa dengan pemaksaan kepada semua anggota masyarakat.

## 4. ETIKA DI LUAR POLITIK

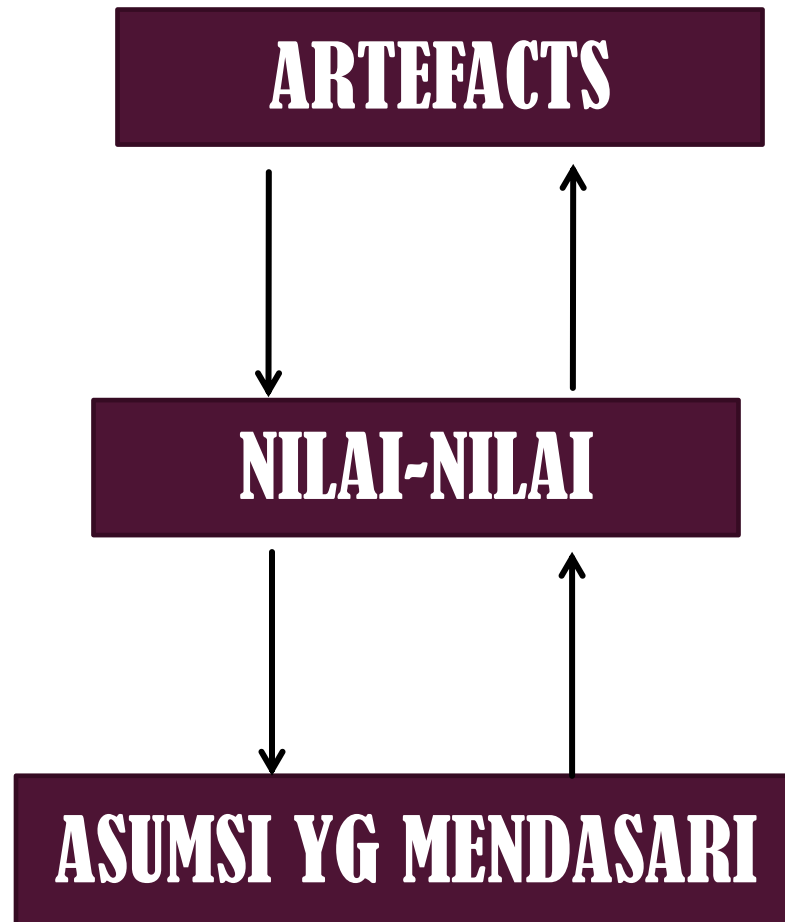
- **Dimensi etika** menjadi semacam penilaian dari luar, yang berasal dari suatu otoritas.
- **Otoritas ini bukan kekuatan efektif** karena tidak memiliki organ/jalur langsung untuk menentukan hukum.
- Pola hubungan ini mirip dengan **peran profetik**: nabi sebagai yang mengetahui dan dapat meramalkan tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena di luar politik.
- **Hubungan moral dan hukum bersifat konfliktual** → pemisahan agama dan politik

## 5. POLITIK DAN KEKUATAN SEJARAH

- Politik dikaitkan dengan campurtangan kekuatan dalam sejarah: partai politik, militer, gerakan mahasiswa, atau gerakan buruh.
- Kekuatan ini: tindakan kolektif berhasil dengan melandaskan diri pada mesin institusional.
- Etika sebagai salah satu dimensi sejarah sebagai etika kongkrit, tidak hanya bentuk tindakan
- Interaksi sosial yang dominan: kekuasaan dan moralitas. Hubungan keduanya ambigu.
- Kekuasaan cenderung menentukan legitimasi.
- Etika berbagi lahan dengan politik.
- Melalui politik etika menjadi efektif: hukum, lembaga negara, upaya kesejahteraan/keadilan
- Tapi etika tidak bisa direduksi ke politik: yang sesuai hukum belum tentu sesuai keadilan.
- 
- Hukum merupakan hasil negosiasi dan konsesi.
- Politik menggunakan etika hanya untuk mendapat legitimasi.

# TIGA TINGKATAN BUDAYA

EDGAR SCHEIN (1992)



- Struktur-struktur & Proses Organisasi yang Terlihat: **kode etik, SOP, upacara, peraturan**
- Strategi, Tujuan, Filsafat
- → **Dasar-dasar pembenaran tindakan**
- Keyakinan, persepsi, pikiran, perasaan yg tak selalu disadari: **Habitus, Etos**
- **Sumber terdalam nilai & tindakan**

## ARTEFAKS

- Laporan, cerita heroik pencapaian, prestasi organisasi, hukum
- **Ritus:** kegiatan-kegiatan yang berulang dan ber SOP digunakan untuk memengaruhi perilaku dan pemahaman anggota-anggota organisasi/lembaga
- **Simbol Budaya**
- **Objek, tindakan** atau **peristiwa** apapun yang berfungsi menyampaikan makna budaya

## NILAI-NILAI BERSAMA

- Membantu mengubah kegiatan-kegiatan rutin menjadi tindakan penting dan berharga
- Mengarahkan organisasi ke nilai-nilai penting masyarakat
- Memperkuat identitas organisasi
- Meningkatkan komitmen bersama
- Membangun sistem sosial yang stabil
- Mengurangi kontrol birokrasi

## ASUMSI YANG MENDASARI

- Sampai pada **keyakinan diri** bahwa **kejujuran & integritas** penting untuk membangun identitas hakim yang kompeten & profesional
- **Makna** kode etik hakim, aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat dipahami dengan baik sehingga **menghayati apa yang diharapkan dari organisasi & masyarakat**
- Suatu **keyakinan** bahwa **bertindak adil & jujur** itu menjadi pilar utama hakim sehingga menumbuhkan **jiwa korsa hakim**

## Etika Publik

Dasar pertimbangan atau pedoman dalam menentukan **baik/buruk, benar/salah tindakan atau keputusan** untuk mengarahkan **kebijakan publik** dalam kerangka **pelayanan publik**.

### F O K U S

1. **Tujuan:** pelayanan publik **berkualitas, responsif dan relevan**
2. **Modalitas etika:** menjembatani antara **norma dan tindakan nyata**

3. **Refleksi:** pertimbangan dalam menentukan **pilihan sarana kebijakan publik** dan alat **evaluasi perhitungan** konsekuensi etis.

## Etika Politik

Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka **memperluas lingkup kebebasan** dan **membangun institusi-institusi yang lebih adil**

### F O K U S

1. Upaya **hidup bersama yang damai dan sejahtera**
2. **memperluas lingkup kebebasan**

3. **membangun institusi-institusi yang lebih adil**